

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang telah dibahas dalam bab V sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan bank sampah yang baru berdiri sejak 2014 dilaksanakan oleh bidang proyek pengembangan bisnis merupakan upaya perusahaan daerah dibawah PD Kebersihan Kota Bandung untuk membentuk unit usaha dibidang pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 20, 21 dan 22 mengenai pengurangan dan penanganan yang dilaksanakan dalam bentuk bank sampah. Dengan membentuk unit-unit bank sampah di tingkat masyarakat dan setiap TPS yang ada di Kota Bandung, Namun baik ditingkat masyarakat dan TPS belum terlaksana.
2. Temuan atau fakta yang terjadi dilapangan bahwa Bidang proyek pengembangan bisnis PD Kebersihan Kota Bandung dalam mengimplementasikan bank sampah, dengan melaksanakan pengurangan dan penanganan. Selama kurun waktu 2 tahun bidang ini masih belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah, yang masih cenderung kegiatan bank sampah berpusat pada bidang proyek pengembangan bisnis. Karena masih adanya beberapa pelaksana TPS yang belum melakukan bank sampah sesuai Undang-Undang No 18 Tahun

2008 Pasal 20, 21, 22 yaitu pengurangan dengan melakukan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah sehingga bidang proyek pengembangan bisnis belum dapat melakukan kegiatan seperti pencapaian target pengurangan, penerapan teknologi ramah lingkungan, penerapan label produk, kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang serta pemasaran produk-produk daur ulang. Serta belum dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaatnya kepada masyarakat dan pelaksana di TPS. Implementasi kebijakan dilihat dari 4 variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. Dalam Implementasi pengelolaan bank sampah di TPS dan masyarakat terkait komunikasi, dapat disimpulkan antara lain:

- Bahwa komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuannya untuk mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengubah perilaku dalam pengelolaan bank sampah dengan melakukan pemilahan dari sumbernya, sehingga wajar saja kalau bank sampah ditingkat masyarakat tidak berjalan. Karena fokus dari bidang pengembangan bisnis masih berorientasi pada profit perusahaan, belum kepada pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjalankan bank sampah, padahal kalau bank sampah sudah dikomunikasikan kepada masyarakat tentu bisa lebih berkembang. Lalu untuk pelaksanaan bank sampah ditingkat TPS hanya sebatas himbauan, tidak benar-benar dilaksanakan

secara serius dan berkelanjutan kenyataan dilapangan memang tidak terselenggara bank sampah sebagaimana semestinya

- Komunikasi belum dilakukan kepada masyarakat secara jelas hanya kepada kecamatan maupun kelurahan yang mengundang bidang proyek pengembangan bisnis sebagai narasumber mengenai bank sampah.

4. Dalam Implementasi pengelolaan bank sampah di 10 TPS terkait sumberdaya, dapat disimpulkan antara lain:

- Bahwa masyarakat tidak dilibatkan padahal sumberdaya yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan bank sampah, seharusnya masyarakat menjadi sasaran utama yang dilibatkan dalam mengembangkan bank sampah sehingga dapat menerapkannya dilingkungan sekitar tempat tinggalnya, kenyatannya bidang proyek pengembangan bisnis hanya memanfaatkan pegawainya saja untuk menggerakkan bank sampah, namun hal tersebut tidak efektif, tetapi jika dilakukan bersama-sama akan menumbuhkan kreatifitas baru yang berasal dari masyarakat sekitar, sehingga muncul ide-ide baru yang mungkin saja dapat memberikan masukan terhadap pengelolaan bank sampah, kreatifitas dalam memanfaatkan sampah, cara pemanfaatan sampah hingga nilai ekonomis yang didapatkan bagi masyarakat itu sendiri.

- Bidang proyek pengembangan bisnis saat ini masih kekurangan baik staff maupun pelaksana ditingkat TPS yang bukan merupakan pegawai langsung dari PD Kebersihan. Semua pelaksana bank sampah di TPS bukan merupakan pegawai langsung dari bidang proyek pengembangan bisnis yang mendapatkan insentif, sehingga sulit melaksanakan bank sampah serta jumlah pelaksana bank sampah yang hanya berjumlah dua orang, dan juga seharusnya di setiap TPS ada unit-unit bank sampah yang dikembangkan oleh masyarakat dan pelaksana TPS sehingga bidang proyek pengembangan bisnis hanya memantau tidak mengendalikan sepenuhnya.
- Masyarakat dan pelaksana TPS tidak diberikan kewenangan untuk menjalankan bank sampah secara mandiri sehingga mereka tidak dapat memberikan inspirasinya untuk mengelola bank sampah, namun secara rutin harus diberikan motivasi oleh bidang proyek pengembangan bisnis baik berupa penghargaan maupun diadakannya perlombaan seputar kegiatan bank sampah.
- Sarana dan prasarana di setiap TPS tidak disediakan ruangan khusus untuk melaksanakan kegiatan bank sampah, sehingga pemanfaatan langsung di TPS seperti biodigester dan kompos tidak dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dari mulai proses pembuatan kompos, pemasaran kompos hingga

menggunakan kompos untuk menanam di pekarangan rumahnya masing-masing, sehingga pemanfaatan melalui bank sampah selain memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat juga terhadap lingkungan sekitar.

- Seharunya seluruh TPS di kota Bandung sudah memiliki atap yang tertutup, memiliki gerbang, serta ruangan untuk kegiatan bank sampah yang didukung oleh pelaksana yang dapat memberikan edukasi bagi masyarakat tentang pengelolaan bank sampah.

5. Dalam Implementasi pengelolaan bank sampah di TPS dan masyarakat terkait disposisi, dapat disimpulkan antara lain:

- Bidang proyek pengembangan bisnis dalam menyikapi pengelolaan bank sampah ditingkat masyarakat belum sebagai fasilitator pelaksanaan bank sampah, seperti menyediakan insentif bagi pelaksana TPS, mengkoordinasikan kecamatan maupun kelurahan untuk mengumpulkan warganya dan memberikan pelatihan dan pengetahuan mengenai bank sampah, membentuk langsung kepengurusan bank sampah ditingkat RT/RW serta memantau secara berkala kegiatan bank sampah, jangan sampai kegiatan bank sampah itu hanya beberapa bulan saja berjalan melainkan harus terus melakukan inovasi dari pemanfaatan sampah.

6. Dalam Implementasi pengelolaan bank sampah di 10 TPS terkait struktur birokrasi, dapat disimpulkan antara lain:

- Bahwa bidang proyek pengembangan bisnis memiliki dan menjalankan kegiatan pengelolaan bank sampah dengan SOP yang sudah diberikan langsung oleh Direksi PD.Kebersihan Kota Bandung, namun prosedur standar kerja tersebut hanya untuk bidang proyek pengembangan bisnis, belum ada prosedur standar kerja untuk masyarakat dalam mengelola bank sampah. Jika sudah ada akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan bank sampah sehingga nantinya seluruh bank sampah memiliki keseragaman prosedur yang memudahkan bidang proyek pengembangan bisnis untuk memantau seluruh kegiatan bank sampah.

Berdasarkan seluruh variabel implementasi pengelolaan bank sampah di Bidang Proyek Pengembangan Bisnis PD Kebersihan yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan terjadi ketidaksesuaian tujuan dari dibentuknya bank sampah sehingga manfaatnya pun belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Bidang Proyek Pengembangan Bisnis dan PD Kebersihan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Bidang proyek pengembangan bisnis harus melakukan sosialisasi berdasarkan pada tujuan dibentuknya bank sampah yaitu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengubah perilaku dalam pengelolaan sampah dengan cara membiasakan diri untuk memilah sampah dari sumbernya, seharusnya di fokuskan dulu kepada semua masyarakat bisa melalui pertemuan RT/RW maupun dengan komunitas yang ada dilingkungan masyarakat melakukan pertemuan untuk membahas bank sampah ditingkat masyarakat, kepengurusannya, mekanismenya serta pemanfaatan melalui bank sampah seperti kompos, biodigester dan kerajinan dari sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. selain itu komunikasi yang dilakukan harus dua arah sehingga masukan dari masyarakat kepada bidang proyek pengembangan bisnis perlu dipertimbangkan agar menemui kata sepakat. Untuk pelaksana di TPS pun perlu dilakukan pendekatan yang rutin dan membiasakan untuk berdiskusi karena pelaksana TPS bukan pegawai langsung PD Kebersihan sehingga meyulitkan untuk diberikan arahan.
2. Terkait sumberdaya bidang proyek pengembangan bisnis harus bisa memberdayakan masyarakat terlebih dahulu sebagai sumberdaya pendukung utama agar terlaksananya bank sampah, karena jika masyarakat sudah tertarik dengan bank sampah dan mau menjadi bagian dari kepengurusannya maka akan berkembang, karena semakin beragamnya latar belakang masyarakat akan memberikan ide-ide untuk

dapat membantu dalam menginovasikan sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis.

3. Selain itu untuk insentif bagi pelaksana TPS juga perlu diperhatikan agar mereka mau membantu masyarakat dalam melaksanakan bank sampah, selain itu jumlah pelaksana yang harus lebih dari dua orang. Serta bidang proyek pengembangan bisnis harus menyediakan tempat untuk kegiatan bank sampah yang nantinya menjadi unit-unit bank sampah disetiap TPS.
4. Kewenangan harus diberikan kepada masyarakat dan pelaksana TPS sebagai pendukung pelaksanaan bank sampah sehingga bidang proyek pengembangan bisnis hanya memantu saja. Dengan kewenangan yang diberikan nantinya pelaksana bank sampah dapat juga mengadakan kegiatan lain seputar bank sampah baik perlombaan antar RT/RW maupun berkreasi dengan sampah-sampah yang ada.
5. Sarana dan prasara pendukung pelaksanaan bank sampah harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti tempat khusus pelaksanaan bank sampah, penimbangan hingga lahan untuk menanam dengan kompos hasil dari sampah organik. Selain itu TPS yang harus tertata dilengkapi dengan atap yang tertutup, tempat pemilahan yang tidak tercampur serta jauh dari pemukiman masyarakat.
6. Bidang proyek pengembangan bisnis harus sebagai fasilitator saja dalam pelaksanaan bank sampah ditingkat masyarakat dan TPS, sehingga

memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk ikut serta kepada pengelolaan bank sampah.

7. Prosedur standar kerja untuk pengelolaan bank sampah di masyarakat harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama agar tidak yang merasa keberatan baik masalah harga jual, sistem tabungan, maupun pemanfaatan sampah menjadi kompos maupun kerajinan.

Demikian saran yang dapat diberikan peneliti dengan harapan Bidang Proyek Pengembangan Bisnis PD Kebersihan Kota Bandung dan seluruh aktor lain yang terlibat agar dapat bersinergi dalam megimplementasikan Pengelolaan Bank Sampah berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah terkait dengan pengurangan dan penanganan sampah, dan peneliti berharap pula bidang proyek pengembangan bisnis dapat benar-benar mengelola TPS yang ada di Kota Bandung dengan menerapkan pengelolaan dengan bank sampah agar persoalan sampah dapat diatasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Goerge, C. Edwards III (1980), *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press
- Abdul Wahab, Solichin (2008), *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakann Negara Edisi Kedua*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Budi Winarno. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Creswell W John (2011), *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluation Quantitative and Qualitative Research*, (Boston, Pearson 2011)
- Ir. M. Iqbal Hasan (2002), *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghaia Indonesia.
- John W. Creswell (2009), *Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prof.Dr. Lexy J. Moleong (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Purwanto, A dan Sulistyastuti, R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Riant Nugroho (2015). *Kebijakan Publik: DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ripley Randal B (1995), *“Policy analysis in political science”*, Chicago, IL: Nelson Hall Publisher.
- Randal B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986). *“Policy Implementation and Bureaucracy 2nd edition”*. Dorsey Press, Chicago, ILLinois.
- Sugiyono (2008), *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*, Bandung. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto (2005), *Prosedur Penelitian*, Jakarta. Bina Aksara.
- Ulber Silalahi (2012), *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung. Refika aditama.
- Ulber Silalahi (2009), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung. PT. Rafika Aditama.
- Ulber Silalahi (2006), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : UNPAR PRESS.

Ulber Silalahi (2012), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.

## **B. WEBSITE**

Indonesia Darurat Sampah

<http://properti.kompas.com/read/2016/01/27/121624921/Indonesia.Darurat.Sampah>,

diunduh pada 22 Desember 2016, pukul 12.00

Solusi Pecahkan Masalah Sampah Kota Bandung <http://www.koran->

[sindo.com/news.php?r=5&n=66&date=2015-11-19](http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=66&date=2015-11-19) diunduh pada 22 Desember 2016, pukul 12.00.

Tupoksi PD Kebersihan Kota Bandung <https://ppid.bandung.go.id> diunduh pada 22

Desember 2016, pukul 12.00

## **C. DOKUMEN**

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Proyek Pengembangan Bisnis

## Interview Guide Pelaksana

### Komunikasi

1. Apakah anda mengetahui isi kebijakan dengan jelas dan apa yang harus dilaksanakan?
2. Bagaimana anda menyalurkan informasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bank sampah?
3. Apakah anda menyampaikan suatu informasi secara jelas dan konsisten?

### Sumberdaya

1. Apakah setiap staf anda memiliki kemampuan dan keterampilan berbeda?
2. Apakah jumlah staf sudah mencukupi untuk melaksanakan bank sampah?
3. Kewenangan seperti apa yang diberikan pada setiap staf?
4. Apakah ada bentuk interaksi antara yang satu bagian dengan yang lainnya?
5. Bagaimana dengan sarana dan prasarana saat ini, apakah sudah menunjang kegiatan sehingga dapat secara optimal atau belum?

### Disposisi

1. Apakah anda tertarik juga dengan kegiatan bank sampah?
2. Seperti apa kontribusi anda terhadap kegiatan bank sampah?
3. Bagaimana tanggapan anda dengan diadakannya kegiatan bank sampah?

### Struktur Birokrasi

1. Apakah terdapat juknis maupun pedoman dalam pelaksanaan bank sampah?

2. Apakah dengan juknis maupun pedoman membantu dalam melaksanakan bank sampah?
3. Seberapa besar fragmentasi (penyebaran tanggung jawab) dalam pelaksanaan bank sampah?